

Analisis Konstruktivis Institusionalisme Pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris

Agung Permadi^{1*}, Elistania²

*Corresponding Author: agung.permadi@budiluhur.ac.id

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30452

Abstract

This research analyzes the factors behind the policy of opening Islamic banks in the United Kingdom. When the UK first opened Islamic banks, there were dynamic challenges in implementing Islamic banking in the UK. The UK's decision to open Islamic banks in 2004 is analyzed using institutional constructivism according to Colin Hay who identifies four factors that cause institutional change within a country. These factors are ideational institutional factors, institutional disequilibrium factors, interpretation factors of momentum (institutional transformation), and policy paradigms. These factors are used to analyze the decision-making process of the UK in opening Islamic banks. This research uses a qualitative approach by Creswell. By this method, the data obtained is analyzed inductively, and an interpretation is then made. The analysis in this research involves the interpretation of the factors identified in the context of the UK's decision to open Islamic banks. This interpretation includes an assessment of the significance of these factors based on the theoretical framework and the author's perspective. This research shows that institutional changes in Islamic finance in London are the result of dynamic interactions between actors and their environment. The UK government, financial institutions, the Muslim community, educational institutions, Islamic economic thought groups, and banks and financial institutions from Gulf countries are actors involved in the dynamics of Islamic finance in London. This is part of the UK's geopolitical strategy, aiming not only to be a leader in conventional banking but also in Islamic banking.

Abstrak

Tulisan ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembukaan bank Islam di Inggris. Saat pertama kali Inggris membuka bank Islam, terdapat dinamika tantangan dalam menerapkan bank Islam di Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay yang mengidentifikasi 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor transformasi institusi, dan paradigma kebijakan. Faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Creswell. Dengan metode ini, data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian dibuat suatu interpretasi. Analisis dalam penelitian ini melibatkan interpretasi faktor-faktor yang diidentifikasi dalam konteks keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Interpretasi ini mencakup penilaian signifikansi faktor-faktor tersebut berdasarkan kerangka teoritis dan perspektif penulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan institusional dalam keuangan Islam di London adalah hasil dari interaksi dinamis antara aktor-aktor dan lingkungan mereka. Pemerintah Inggris, institusi keuangan, komunitas Muslim, lembaga pendidikan, kelompok pemikir ekonomi Islam, dan bank serta lembaga keuangan dari negara-negara Teluk merupakan aktor-aktor yang berperan dalam dinamika keuangan Islam di London. Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Inggris yang bukan hanya ingin menjadi terdepan dalam bank konvensional tetapi juga bank Islam.

Keywords

Bank Islam, Inggris, Komunitas Muslim, Konstruktivis Institusionalisme

Article History

Received November, 30
Revised December, 25
Accepted December, 26
Published December, 27

Corresponding Author

Agung Permadi, Faculty of Social and Global Studies, Universitas Budi Luhur.
Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Jakarta, 12260, Indonesia

Pendahuluan

Momentum pertumbuhan industri perbankan Islam dimulai sejak akhir tahun 1970-an. Perkembangan ini selanjutnya menyentuh pada tingkat 10-15% per tahun sejak tahun 1990 (Alharbi, 2016, pp. 109-136). Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah saja, kawasan lain mulai tertarik untuk mengembangkan keuangan Islam, salah satunya yaitu di Eropa. Luksemburg merupakan negara Eropa pertama yang dijadikan sebagai pasar percobaan keuangan Islam. Bank Islam di Luksemburg didirikan untuk melihat kebutuhan pasar domestik Luksemburg sehingga belum dilakukan langkah yang lebih besar (Ernst and Young S.A, 2019). Perancis dan Jerman merupakan dua negara yang paling banyak populasi Muslimnya dibandingkan dengan negara Eropa lain. Upaya pemerintah Perancis dan Jerman dilihat sudah maksimal. Hanya saja, keadaan masyarakat kedua negara belum menerima keuangan Islam. Terlebih pasca peristiwa 9/11. Muslim Jerman dipandang belum memosisikan diri sebagai potensi pasar yang menarik (El-Mogaddedi, 2007, pp. 28-31). Selain itu, Undang-Undang perpajakan di Jerman dan Perancis tidak menguntungkan bagi perbankan syariah (Schoenbach, 2013) (Caristi et al, 2013). Italia memiliki kedekatan sejarah dengan Islam. Meskipun demikian, pemerintah Italia dilihat kurang serius mengembangkan keuangan Islam (Colditz, K, 2009). Bosnia dan Herzegovina, Irlandia, dan Swiss memulai pengembangan keuangan Islam yang masih pada tahap awal. Perkembangan selanjutnya tergantung kepada kebijakan pemerintah negara terkait keuangan Islam (Ergun Ugur & Djedovic Irfan, 2011).

Dalam momentum tersebut, pemerintah Inggris juga mengambil sikap untuk mengembangkan bank Islam di negaranya pada tahun 1980, dengan memperkenalkan transaksi *murabahah*.¹ Transaksi tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Untuk membuka bank Islam, Inggris bekerjasama dengan Al Baraka Group yang merupakan lembaga keuangan Bahrain. Kerjasama ini terbentuk atas pertimbangan bahwa Al Baraka Group merupakan lembaga keuangan Islam yang mapan dan terkemuka. Al Baraka memiliki posisi yang strategis bagi negara-negara Teluk, kolaborasi ini dapat dilihat sebagai peluang bagi Inggris untuk membentuk basis pasar keuangan Teluk dan memperkuat hubungan ekonomi dengan wilayah tersebut. Peluang ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dimana Inggris memiliki peluang untuk memahami dan ikut serta dalam pasar keuangan Islam yang sedang berkembang. Sementara Al Baraka dapat memperluas operasi dan pengaruhnya dengan mendirikan cabang di London sebagai pusat keuangan global. Kerjasama ini menghasilkan Al Baraka International bank yang diluncurkan pada tahun 1982 (Wilson, R, 2010). Pembentukan bank ini memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur pada industri keuangan Islam di Inggris (Riaz, U.A, 2014, p. 30). Meskipun mendapatkan kesuksesan, *the Bank of England* tidak merasa senang dengan kehadiran *Al-Baraka bank* karena kepemilikannya yang bersifat individu, situasi dimana perbankan Inggris anti terhadapnya. Bank ini pun ditutup pada tahun 1993. Pasca ditutupnya *Al-Baraka bank*, kesadaran

¹ *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Islam membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank *syariah* dan nasabah.

perbankan Islam di Inggris meningkat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan legislasi dan regulasi yang dapat mendukung bank Islam di Inggris dapat berdiri secara independen. Seperti tercermin dalam pidato Eddie George (Speech given by Sir Edward George, Governor of the Bank of England, 2003), gubernur *Bank of England* pada Islamic Home Finance Seminar, London tahun 2003:

“When I looked into it a bit more, it seemed to me that in fact many of the financial products commonly used in this country – for example current accounts and savings products, such as investment funds or unit trusts, or borrowing through leasing or hire purchase products – already had some, at least, of the characteristics consistent with the teachings of the Quran if only we could come to a better and more precise understanding of the Islamic financial products that were being talked about at that time – if only we could encourage the Islamic community to develop a more consistent – and desirably more standardized – specification of the products they wished to introduce - then, with a little imagination, we could surely find ways of fitting them in to our legal and regulatory framework in this country, on a par with our more traditional financial instruments.”

Pernyataan George yang menyepadankan beberapa produk keuangan Inggris yang sudah sesuai dengan ajaran Al-Qur’an—menunjukkan bahwa Inggris memiliki keinginan untuk mengembangkan perbankan Islam dengan menggunakan kerangka hukum dan peraturan yang sesuai dengan instrumen keuangan Inggris (Langton, 2011). Adanya regulasi khusus dan panduan operasional perbankan Islam mencerminkan upaya Inggris untuk mengakomodasi dan mempromosikan keuangan Islam di London.

Pada tahun 2000-an pemerintah Inggris mulai mengambil langkah strategis mengenai perbankan Islam. Dalam perjalanannya, pemerintah Inggris berusaha mengembangkan program kerja untuk membuat peraturan perbankan Islam sesuai dengan peraturan di Inggris. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi atas meningkatkan aset bank Islam di negara-negara Teluk dan keinginan pemerintah Inggris yang juga ingin memegang bagian dalam keuangan Islam (Wilson, R, 2010). Selain itu, bank Islam juga dibutuhkan oleh 2.5 juta masyarakat Muslim di Inggris yang menjadikannya sebagai alternatif untuk menyimpan aset sesuai dengan sistem kepercayaan mereka. Pada Oktober 2004, pemerintah Inggris meluncurkan *Islamic Bank of Britain* (IBB) melalui Bursa Efek London. Dengan dibukanya IBB ini, Inggris menjadi negara non-Timur Tengah pertama yang memiliki bank Islam secara independen. Sayangnya, pendirian IBB di tahun 2004 memiliki selisih tiga tahun pasca peristiwa tragis di New York pada September 2001. Kejadian ini merubah pandangan dunia tentang Islam/Muslim, hal ini juga terjadi di Inggris. Sentimen terhadap Muslim atau biasa disebut dengan *islamophobia* dijelaskan oleh Warde (2000) sebagai tantangan yang dihadapi oleh bank Islam meliputi permasalahan budaya, yang berhubungan dengan kepercayaan (Warde, I, 2000). Ali dan Syed (2010) menyebut bahwa peristiwa 9/11 memberikan persepsi buruk dan kesalahpahaman tentang sistem perbankan Islam. Segmentasi populasi Muslim di Inggris yang luas menempatkan Islam sebagai agama yang membawa teror dan kekerasan. Riaz et al. (2017) menunjukkan data bahwa sekitar 46% Muslim Inggris, termasuk 7.2% yang tidak bekerja, tinggal di daerah dengan akses finansial yang terbatas, menunjukkan ketidaksetaraan dalam perhatian dan akses. Menyebabkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh Muslim di Inggris. Sentimen

ini juga diperparah oleh partai politik sayap kanan (Mrda, O, 2014), elit politik (Selbourne, D, 2001) dan media (Saeed, A, 2007, pp. 443-462).

Penelitian mengenai kemungkinan bank Islam dapat berkembang di Eropa telah diteliti dalam dekade terakhir. Peneliti seperti Akbar (2012) meyakini terdapat pertumbuhan dalam industri perbankan Islam (Akbar, 2012) dimana pertumbuhan Keuangan Islam tidak hanya berkembang di negara-negara Timur Tengah (Elgari, 2011). Literatur sebelumnya menyebutkan, terdapat beberapa usaha untuk mengembangkan keuangan Islam dengan produk perbankan Islam di Eropa seperti Luksemburg (Ernst and Young, 2015), Prancis (Arnaud, 2010), Jerman (Engels, 2010), dan Inggris (Wilson, 2010) mulai mengembangkan keuangan Islam. Tetapi pada perjalanannya, hanya Inggris yang dapat bertahan dengan regulasi domestik. Inggris menjadi negara Eropa dengan produk perbankan Islam lebih berkembang dibandingkan negara Eropa lainnya (Asmat, 2014). Pemerintah Inggris menyesuaikan produk Islam dengan sektor perbankan konvensional (Belabes, 2011).

Perkembangan keuangan Islam bukan hanya merupakan isu ekonomi. Keuangan Islam dapat diteliti menggunakan pendekatan lain. Penelitian ini merupakan studi terhadap kebijakan Inggris dalam membuka Islamic Bank of Britain (IBB) dan implikasinya terhadap dunia perbankan Inggris. Pada penelitian sebelumnya, IBB dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi (Khalid, 2011), budaya (Chachi, 2014), critical theory (Riaz, 2014) dan kombinasi hukum dan budaya (Dieppe, 2017). Signifikansi tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah studi atas pembentukan IBB dianalisis dengan pendekatan ilmu Hubungan Internasional, yaitu dengan menggunakan teori Konstruktivis Institusionalis. Scope yang terdapat dalam studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberi fokus terhadap kerjasama Inggris dan Al Baraka lembaga keuangan Bahrain. Kerjasama awal Inggris dengan Al Baraka mengalami pasang surut sejak Inggris menutup Al Baraka bank pada tahun 1993. Pada tahun 2004, Inggris membuka Islamic Bank of Britain (IBB) yang merupakan bank Islam independen milik Inggris.

Bank Islam dalam keuangan Islam tidak dapat hanya dilihat sebagai sistem perbankan biasa. Identitas “Islam” yang melekat di dalamnya memberikan sentimen tersendiri terutama bagi masyarakat Eropa yang notabene bukan negara Islam. Hal ini juga berpengaruh di Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam mengantarkan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini *“Mengapa pemerintah Inggris membuka Bank Islam pada tahun 2004?”*

Kerangka Teoritis

Konstruktivis Institusionalisme

Berkembangnya penelitian institusionalisme secara tidak langsung memberikan pengembangan dalam studi ini. Pada tahun 1985, James G. March dan Johan P. Olsen berbicara cukup nyaman tentang institusionalisme baru dalam bentuk tunggal. Pada tahun 1996, Peter A. Hall dan Rosemary Taylor menetapkan tiga jenis institusionalisme. Pada tahun 1998 B. Guy Peters mengidentifikasi tujuh institusionalisme baru. Peneliti sebelumnya, menurut Hay (2006) tidak memberikan referensi apapun terhadap konstruktivisme. Belum ada varian dari institusionalisme digabungkan dengan konstruktivisme. Hay melihat masih sedikit referensi penelitian yang dapat menjelaskan ideasional, diskursif, atau berkaitan dengan pandangan konstruktivisme. Oleh karena itu, Hay memberikan pandangan baru terhadap institusi dengan menggunakan pendekatan konstruktivis institusionalisme (*constructivist institutionalism*). Colin Hay dalam tulisannya

“*Constructivist Institutionalism*” menjelaskan adanya ketidakseimbangan sebuah institusi (*institutional disequilibrium*).

Menurut Hay, ketidakseimbangan institusi disebabkan oleh perbedaan motivasi aktor dalam institusi. Hal ini disebabkan adanya kepentingan yang berubah karena aktor mengubah pemahaman mereka terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas mereka. Aktor tidak memiliki preferensi yang tetap karena setiap aktor memiliki motivasi yang berbeda. Hal inilah yang membuat aktor di dalam institusi seringkali memiliki preferensi yang berbeda. Lebih lanjut Hay menjelaskan aktor dapat mentransformasikan institusi dengan faktor berubahnya lingkungan, interpretasi atas suatu isu sehingga menghasilkan paradigma kebijakan (*policy paradigm*) yang baru.

Konstruktivis institusionalisme memiliki kedekatan terhadap institusionalisme. Konstruktivis institusionalisme merupakan gabungan dari dua paradigma; institusionalisme dan konstruktivisme. Asumsi institusionalisme melihat negara sebagai *self-interested*; aktor rasional yang bertahan dalam situasi anarki dan ketidakpastian hubungan antar negara (Keohane, 1984). Oleh karena itu, negara membuat suatu perangkat kerjasama dengan negara lain yang memiliki kepentingan bersama. Perangkat kerjasama bersama tersebut disebut institusi. Institusi dipandang sebagai media kerjasama oleh aktor berkepentingan di dalamnya. Terdapat aturan, norma, serta cara pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakpastian hubungan antar negara.

Konstruktivisme melihat realita sosial tidak terjadi begitu saja (*given*). Realitas sosial dilihat sebagai sebuah konstruksi. Realita sosial dunia tidak hanya dibentuk oleh fakta yang dapat dilihat oleh mata, bersifat material. Tetapi dibentuk juga oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia, bersifat immaterial. Variabel tersebut menurut konstruktivisme, lahir karena dibentuk oleh variabel immaterial seperti nilai, norma, dan keyakinan yang dikonstruksi oleh orang ataupun dalam hal ini negara, di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam konstruktivisme, bentuk tersebut merupakan ideasional; sesuatu yang dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (Hay, 2006, pp. 18-21).

Dengan menggabungkan kedua paradigma tersebut, Konstruktivis institusionalisme berusaha menjelaskan permasalahan-permasalahan kompleks perubahan institusi. *Rational choice* dan *normative/sociological institutionalism* dipandang memiliki keterbatasan menjelaskan perubahan yang terjadi. Konstruktivis institusionalisme didorong oleh keinginan untuk menangkap, menggambarkan, dan menginterogasi ketidakseimbangan institusi (*institutional disequilibrium*).

Konstruktivis institusionalisme berupaya untuk memecahkan *puzzle* empiris tertentu. *Puzzle* tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai perubahan di dalam sebuah institusi pasca pembentukannya. Pemahaman ini menjadikan konstruktivis institusionalisme berperan dalam memberikan gagasan untuk lebih mengembangkan institusionalisme. Konstruktivis institusionalisme dapat menelusuri bagaimana institusi terbentuk dalam keadaan yang tidak pasti atau krisis.

Terdapat ketidakseimbangan dalam sebuah institusi. Aktor dalam hal ini negara menurut Hay, selalu berpikir strategis dalam setiap pengambilan keputusan. Negara selalu berusaha mewujudkan tujuan tertentu yang kompleks, kontingen, dan terus berubah. Bagi Hay, perubahan dalam institusi disebabkan karena aktor (negara) tidak dapat diasumsikan hanya memiliki kepentingan (preferensi) bersifat tetap. Perubahan dalam institusi merupakan sebuah interaksi antar tindakan strategis. Konstruktivis institusionalisme menekankan bukan hanya kepada dependensi institusi, tetapi juga dependensi ideasional. Dengan kata lain, pembahasannya bukan

hanya tentang pembentukan institusi, tetapi ide-ide dasar dan bagaimana institusi tersebut didesain dan dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan konstruktivis institusionalisme karena asumsi teori tersebut kontekstual dengan realitas yang terjadi di balik alasan Inggris membentuk bank Islam. Konstruktivis Institusionalisme merupakan pendekatan yang berupaya untuk menganalisis sebuah momen sebagai kunci dari perubahan dan kondisi tentang eksisnya perubahan institusi yang kompleks. Selain dari dorongan komunitas Islam dan tragedi 9/11, dorongan Inggris untuk membentuk bank Islam di luar Al Baraka Group diasumsikan merupakan ide untuk melanggengkan kepentingan Inggris.

Metode

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan untuk menganalisa konstruksi apa yang hendak dibangun oleh Inggris melalui pembentukan Bank Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menggali masalah penelitian lebih mendalam, terutama karena masalahnya tidak bisa dipecahkan dengan penelitian berbasis angka, dan sangat bergantung pada berbagai jenis teks. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif membantu dalam membangun pemahaman bersama antara peneliti dan pembaca tentang realitas sosial (Creswell, 1994). Creswell juga menekankan pentingnya analisis data induktif yang memungkinkan temuan dapat muncul dari data, bukan berdasarkan hipotesis ataupun teori terdahulu. Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan analisis dan pengetahuan pribadi dalam konteks sosial tempat data diperoleh. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dengan data primer dari dokumen resmi seperti laporan tahunan lembaga dan pernyataan pemerintah Inggris, serta data sekunder dari publikasi jurnal, buku, artikel, dan sumber informasi online.

Hasil dan Pembahasan

Pada periode 1970, lingkungan perbankan London berubah karena perkembangan keuangan Islam. Meskipun staf-staf bank di London mayoritas orang Inggris (*British*) dan non-Muslim, secara bertahap mengetahui keuangan Islam dan hukum *syariah* karena tuntutan klien negara Teluk dan komunitas *British Pakistani*. Interaksi yang terjadi antara bankir-bankir London dan klien negara Teluk pada akhirnya mengantarkan Muazzam Ali mantan *Vice Chairman, Dar Maal Islami (DMI) Swiss*, mendirikan *Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI)* pada tahun 1976. Institusi ini didirikan untuk menggabungkan peneliti-peneliti ekonomi Islam, komunitas *British Pakistani*, dan klien dari negara-negara Teluk. IIBI memiliki tujuan sebagai tempat bertukar pikiran tentang perbankan Islam (Institute of Islamic Banking and Insurance, 2019). Sejak berkembangnya keuangan Islam secara global, London menjadi tempat bagi bank Islam negara Teluk. Bank konvensional di London menyediakan fasilitas deposit dan grosir (*wholesale operations*) bagi bank Islam baru berasal dari negara-negara Teluk. Keuangan Islam berkembang dan menghadirkan bank-bank Islam baru di negara-negara Teluk. Bank-bank tersebut memiliki kekurangan modal dan membutuhkan London sebagai pusat keuangan dunia (Maroun, Y. S, 2002, p. 163).

Bank di London dan bank Islam semakin terkoneksi. Pada tahun 1982, *Al Baraka* membuka cabang di London. Pada awalnya, *Al Baraka* membeli saham *Hargrave Securities* perusahaan penerima deposit di London. Perusahaan ini didirikan untuk menerima setoran dan meminjamkan uang yang diinvestasikan pada hipotek perumahan (Hargrave Investment, 2019).

Setelah membeli seluruh saham *Hargrave Securities*, *Al Baraka* menggantikan semua skema di dalamnya menjadi skema bank Islam. *Al Baraka* melayani komunitas Muslim di London. Kebanyakan klien berasal dari wisatawan Arab yang menghabiskan liburan musim panas di London. Bank ini semakin berkembang di tahun 1987 membuka cabang di *Whitechapel Road* di London. Diikuti dengan pembukaan cabang di *Edgware Road* pada tahun 1989, dan di *Birmingham* pada tahun 1991 dengan total mencapai 11.000 dan 12.000 klien (Al-Omar, F. A, 1996, p. 45).

Meskipun *Al Baraka* menyediakan layanan perbankan di London, sektor paling profit terdapat pada investasi. *Al Baraka* dilihat oleh *Bank of England* sebagai perusahaan investasi dan bukan bank. Hal ini mendapatkan kritik. *Al Baraka* dinilai tidak dapat berkompetisi dengan institusi-institusi perbankan besar lainnya di London. Pengembangan pertumbuhan bank melalui *organic growth* dipandang terbatas. Dalam keadaan ini, *the Bank of England* memperketat persyaratan regulasi setelah ditutupnya *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)*. *The Bank of England* memutuskan untuk tidak meneruskan lisensi bank *Al Baraka*. Konsekuensinya, pada Juni 1993, *Al Baraka* menyerahkan lisensi bank dan menutup cabangnya di London (Wilson, R, 2010, p. 214).

Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay. Hay (2006) mengidentifikasi terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor interpretasi atas momentum (transformasi institusi), dan paradigma kebijakan.

Faktor Ideasional Institusi

Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem norma diatur orang-orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Faktor ideasional menjadi penting karena memuat kepentingan aktor. Ide merupakan konstruksi mental dimiliki individu, organisasi, pembuat kebijakan, kelompok sosial atau masyarakat mengenai seperangkat keyakinan, prinsip dan pengambilan sikap setiap aktor. Hay (2006) mendefinisikan ide sebagai instrumen digunakan aktor untuk mempromosikan kepentingan. Terdapat empat jenis utama ide; ideologi atau sistem kepercayaan bersama (*shared knowledge*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), keyakinan kausal (*cause-effect beliefs*), dan *policy prescriptions* (rekomendasi kebijakan).

Kepercayaan Inggris terhadap keuangan Islam dapat berkembang di Inggris dimulai sejak tahun 1976 yaitu pada saat konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama kali diselenggarakan pada 16 Mei 1976. Khan dan Iqbal (2013) menyebutkan bahwa konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah pada tahun 1976 merupakan salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan ekonomi Islam di Inggris. Konferensi ini membahas secara komprehensif tentang ekonomi Islam. Konferensi ini dihadiri oleh para pakar ekonomi Islam dari seluruh dunia, termasuk dari Inggris. Dalam konferensi tersebut, dibahas berbagai aspek terkait ekonomi Islam, mulai dari teori, praktik, hingga perkembangannya di dunia internasional. Salah satu aspek yang dibahas secara mendalam adalah tentang sistem keuangan Islam. Para pakar ekonomi Islam yang hadir dalam konferensi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan Islam dinilai lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Pembahasan tentang sistem keuangan Islam dalam konferensi tersebut sangat menarik perhatian para peserta, termasuk dari Inggris (Aslam, 2015). Terlebih pada saat itu, populasi Muslim di Inggris semakin meningkat yang membutuhkan produk dan layanan

keuangan sesuai dengan prinsip yang mereka anut (*syariah*). Yayasan Islamic Foundation di Inggris kemudian mendirikan unit ekonomi Islam sebagai pusat penelitian pertama tentang keuangan Islam di Inggris pada september 1976.

Yayasan Islam Inggris berperan aktif merintis ekonomi Islam di Inggris. Menyelenggarakan konferensi, seminar mengenai ekonomi Islam. Pada tahun 1981, Asosiasi Internasional ekonomi Islam didirikan di Inggris. Bertanggungjawab menyelenggarakan konferensi internasional ekonomi Islam (Chachi, A. B, 2014, p. 48). Diskusi dalam konferensi internasional ekonomi Islam di Inggris membahas konsep dan teori ekonomi Islam, serta penerapannya dalam praktik sehari-hari. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat konsep ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang mandiri dan otentik, serta mengembangkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi global. Melalui konferensi dan seminar yang telah diselenggarakan sejak tahun 1976, terdapat peningkatan kesadaran akan pembentukan bank Islam di Inggris sehingga menimbulkan kepercayaan akan nilai-nilai normatif Inggris yang dapat sejalan dengan keuangan Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang ketiganya ini juga dapat ditemukan dalam konsep keuangan Islam seperti larangan *riba*, akuntabilitas keuangan, dan keseimbangan. Normatif belief tersebut telah menjadi faktor yang mendorong perkembangan keuangan Islam di Inggris. Untuk memulainya, Inggris tidak dapat berdiri sendiri terlebih dahulu tetapi harus bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam yang telah lebih dahulu maju yaitu Al Baraka Group. Pada tahun 1983 Inggris membuka kerjasama dengan *Al Baraka Group* sebagai efek dari kausalitas keyakinan Inggris. Sejak didirikannya *Al Baraka bank* di Inggris, Inggris mulai membuat kebijakan terkait perbankan yang sesuai dengan keuangan Islam. Tetapi dalam kerjasama tersebut terdapat ketidakseimbangan antara kerjasama kedua aktor. Faktor ketidakseimbangan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Faktor Ketidakseimbangan Institusi

Fokus utama Colin Hay dalam teori konstruktivis institusionalisme adalah menganalisis transformasi kelembagaan pasca pembentukan. Ketidakseimbangan institusi (*institutional disequilibrium*) disebabkan perbedaan motivasi aktor dalam institusi. Hal ini disebabkan kepentingan aktor yang mengubah pemahaman terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas. Aktor tidak memiliki preferensi tetap. Setiap aktor memiliki motivasi berbeda. Pada kurun waktu 1970-an sampai dengan 1980-an berdiri komunitas intelektual dan institusi pendidikan mengkaji konsep ekonomi dan perbankan Islam. Beberapa juga dilakukan percobaan penerapan konsep *syariah* pada sektor-sektor keuangan di Inggris. Memberikan sumbangsih cukup besar pembentukan pondasi perbankan Islam di Inggris membuat Inggris memiliki preferensi mengembangkan keuangan Islam secara independen. Membuka bank Islam milik Inggris.

Pasca ditutupnya *Al Baraka bank*, pada tahun 1995 Universitas Loughborough bekerjasama dengan *Islamic Foundation United Kingdom* menjadi Universitas pertama di Eropa yang mengakui dan mengajarkan keuangan Islam di tingkat master. Perkembangan ini secara khusus mengundang banyak ketertarikan dan keinginan kerjasama baik individu maupun institusi. Konferensi Universitas Loughborough dengan *Islamic Development Bank* (IDB) dengan direktur *Bank of England* Sir Eddie George membahas kemungkinan perijinan operasional bank Islam di Inggris untuk memfasilitasi masyarakat Muslim Inggris (Chachi, A. B, 2014, p. 49). Perkembangan ini selanjutnya menunjukkan peningkatan di kampus-kampus. Sektor-sektor keuangan mulai tertarik menggunakan

produk-produk keuangan Islam sebagai varian produk. Peningkatan ini semakin menunjukkan eksistensi perbankan Islam bukan hanya bagi masyarakat Muslim Inggris tetapi juga masyarakat non-Muslim. Keadaan ini memperkuat pondasi inisiasi perbankan Islam di Inggris.

Pada tahun 2000, Inggris menjadi tuan rumah Konferensi Internasional ke-4 Ekonomi Islam (*4th International Conference on Islamic Economics*). Inggris menjadi negara Eropa pertama menyelenggarakan acara tersebut. Pada tahun yang sama, jumlah universitas penyedia kuliah keuangan dan perbankan Islam terus meningkat seperti Universitas Portsmouth, Loughborough dan Gloucester (Ashar, 2016, p. 11). Pada tahun 2001, perkembangan perbankan Islam mengalami terobosan politik dan regulasi signifikan pasca terciptanya *working group* tingkat tinggi beranggotakan perwakilan kota, pemerintah, dewan para penyedia dana hipotek (*mortgages lender*), komunitas Muslim dan FSA mengkaji dan menguji hambatan-hambatan perkembangan perbankan Islam di Inggris. Melalui *working group*, muncul istilah "*alternative financial*" ditambahkan dalam regulasi keuangan dan perpajakan dimana tidak ada diskriminasi dalam pengguna jasa keuangan Islam. Pada tahun 2003, pemerintah Inggris meluncurkan satuan tugas pertama demi menjamin perkembangan sektor perbankan Islam di Inggris. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi masuk ke Inggris dan menguatkan ekonomi negara. Tujuan tersebut juga termasuk di dalamnya mempromosikan sektor perbankan Islam kepada industri skala besar maupun kecil, baik dalam dan luar negeri.

Rangkaian upaya pemerintah Inggris dilihat sebagai faktor ketidakseimbangan institusi kerjasama Inggris dengan *Al Baraka Group*. Inggris melihat keuangan Islam sebagai suatu profit yang bisa dicapai. Pidato Sir Eddie George dalam Islamic Home Finance Seminar, London menunjukkan keinginan Inggris untuk membuat bank Islam independen milik Inggris. Dalam pidatonya (see page 3), Sir Eddie ingin membuat potensi sistem keuangan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sir Eddie menekankan pentingnya menyelaraskan praktik keuangan dengan ajaran Al-Quran. Secara implisit ia menganjurkan perlu dibuatnya pemahaman dan standarisasi produk keuangan Islam yang juga tidak mengganggu struktur penting atau bahkan mengorbankan tujuan ekonomi dan sosial. Terlepas dari kurang kompetitifnya *Al Baraka bank* di pasar keuangan konvensional. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya Inggris untuk membuka bank Islam independen Inggris. Terlihat pasca penutupan *Al Baraka bank* di tahun 1993, pemerintah Inggris gencar melakukan kajian-kajian dan mendorong kampus-kampus untuk mengkaji keuangan Islam. Pondasi keuangan Islam Inggris menguat mengantarkan Inggris membuka *Islamic Bank of Britain* di tahun 2004. IBB mendapatkan lisensi langsung dari FSA atau otoritas keuangan Inggris.

Faktor Transformasi Institusi

Konstruktivis institusionalisme memandang aktor selalu berusaha mewujudkan keinginan tertentu dengan kompleks, kontingen, dan terus menerus merubah tujuan. Hal ini menurut Hay, terkadang ada ide yang menyatukan kepentingan aktor atau merubah preferensi aktor. Selain itu, aktor sebagai arsitek institusi memiliki paradigma perubahan kebijakan. Perubahan dipahami sebagai hasil interaksi aktor strategis. Terdapat keadaan ketidakpastian pasca Perang Dingin. Ide-ide memaksimalkan kepentingan merupakan tujuan akhir (*goals*) kerjasama aktor. Keputusan Inggris menutup *Al Baraka bank* di tahun 1993 dan membuka IBB di tahun 2004 dilihat sebagai transformasi institusi diakibatkan oleh interpretasi atas momentum di internal Inggris. Selain dari

keinginan internal pemerintah Inggris, terdapat dorongan berupa advokasi dari komunitas Muslim di Inggris untuk membuka sektor keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam (*syariah*). Pada tahun 1997 Komunitas Muslim di Inggris mendirikan Islamic Finance Council (Aslam, 2015). Dewan ini bertugas untuk mempromosikan dan mengembangkan ekonomi Islam di Inggris.

Masyarakat Muslim di Inggris merupakan bagian sistem politik dan memiliki pengaruh cukup kuat. Khususnya, memberikan pengaruh dalam isu-isu berkaitan dengan Islam. Menurut *Council of Britain's Research and Documentation Committee* (2015) tercatat populasi muslim 4.8% dari total populasi di Inggris dan meningkat hampir dua kali lipat saat sensus pertama di tahun 2001. Populasi terbanyak keempat di Inggris setelah Kristen, Atheis, dan tidak menyebutkan agamanya (Muslim Council of Britain's Research and Documentation Committee, 2015). Meskipun terdapat *self-exclusion* yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya *financial exclusion*, Muslim di Inggris lebih terorganisir. Untuk mendapatkan hak terutama dalam sektor finansial, *Muslim Council of Britain* melakukan lobi kepada pemerintah Inggris. Menurut Chase (2012), praktek *lobbying* yang terjadi pada kasus perjanjian operasional perbankan Islam di Inggris merupakan praktek *bottom-up* (Chase, 2012).

Lobby yang dilakukan *Muslim Council of Britain* memperlihatkan keberhasilannya pada tahun 2003. Sir Howard Davies, *Chairman* FSA pada saat itu mengutarakan dukungan dalam sebuah konferensi keuangan dan perbankan Islam di Bahrain. Sir Howard menyampaikan tidak ada keberatan maupun sanggahan dalam ide beroperasi perbankan Islam di Inggris jika perbankan Islam terbukti mampu memenuhi persyaratan regulasi oleh FSA. Menurutnya, Inggris memiliki kepentingan jelas memastikan perbankan Islam dapat tumbuh di Inggris (Asmat, 2014, p. 99). Hingga tahun 2004, *Muslim Council of Britain* bekerjasama dengan kelompok kerja pemerintah merumuskan reformasi hukum legal bagi terwujudnya perbankan Islam dan menerbitkan materi pendidikan keuangan Islam bagi masyarakat non-Muslim. *HM Treasury*, *Financial Service Authority*, dan *Bank of England* membentuk kelompok kerja bersama dengan *Muslim Council of Britain* dan institusi-institusi lainnya.

Faktor Perubahan Paradigma Kebijakan

Konstruktivis institusionalisme mengidentifikasi sejauh mana aktor dapat menafsirkan sinyal lingkungan. Bahkan, memperhatikan adanya perubahan paradigma kebijakan. Aktor juga dapat melihat pergeseran paradigma sebagai perubahan yang signifikan. Hay menjelaskan bahwa aktor memiliki penafsiran tersendiri terhadap suatu isu. Skema interpretatif tersebut diinternalisasi oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan mendefinisikan berbagai strategi kebijakan, mekanisme dan instrumen sesuai dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Menurut Pew Research Center (2023), populasi Muslim di Inggris adalah 4,1 juta jiwa, atau sekitar 6,3% dari total populasi Inggris. Total populasi ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan total Populasi Muslim di Jerman yang mencapai 4,95 juta jiwa, atau sekitar 6,1% dari total populasi Jerman. Terlebih Prancis yang memiliki Populasi Muslim terbanyak di Eropa Barat yaitu sebanyak 5,7 juta jiwa, atau sekitar 8,8% dari total populasi Perancis. Meskipun demikian, terjadi perubahan paradigma kebijakan pemerintah Inggris. Keuangan Islam dipandang oleh pemerintah Inggris sebagai pengembangan dari jenis keuangan selain keuangan konvensional. Pada tahun 1982, Inggris bekerjasama dengan *Al Baraka* lembaga keuangan dari Bahrain. Kerjasama tersebut memiliki preferensi yang berbeda bagi setiap aktor. Kepentingan Inggris bekerjasama dengan *Al*

Baraka adalah untuk mempelajari keuangan Islam dari salah satu lembaga keuangan Islam terbesar di dunia. Kepentingan *Al Baraka* adalah membuka cabang di London. London merupakan lokasi paling strategis. Sebelumnya bank ini telah memiliki 695 cabang di 17 negara.

Perbedaan preferensi kedua aktor memunculkan ketidakseimbangan institusi menurut Konstruktivis institusionalisme. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya menyebabkan kedua aktor mengalami pasang surut kerjasama. Pada tahun 1995, *Al Baraka bank* ditutup. Setelah ditutupnya bank ini masyarakat Muslim semakin menunjukkan keinginannya menggunakan institusi keuangan berdasarkan nilai fundamental mereka. Perubahan paradigma kebijakan pemerintah Inggris juga datang dari *Muslim Council* di Inggris yang aktif memberikan dorongan kepada pemerintah Inggris untuk membuka bank Islam.

Perubahan paradigma kebijakan Inggris tidak hanya datang dari internal saja. Dari faktor eksternal, sejak tahun 1992, terdapat pertumbuhan aset bank Islam dengan rata-rata 42%. Aset tersebut mencapai USD 648 miliar. Kerjasama awal Inggris dengan *Al Baraka Group* dimaksudkan untuk memahami mekanisme perbankan Islam. Inggris melihat *Al Baraka* mampu memberikan contoh ideal perbankan Islam karena memiliki cabang di beberapa negara. Dengan semakin meningkatkan aset bank Islam di dunia, Inggris berkeinginan membuka bank Islam independen milik Inggris. Keinginan tersebut direalisasikan Inggris melalui kajian-kajian ekonomi Islam lewat universitas-universitas di Inggris sampai dengan menjadi tuan rumah konferensi Islam pertama di Eropa.

Inggris tidak membuka *Islamic Bank of Britain* di tahun 2004 tanpa perencanaan sebelumnya. Terdapat upaya-upaya untuk sampai kepada titik pembukaan bank Islam independen Inggris. Dorongan dari komunitas Muslim di Inggris memberikan kontribusi tersendiri. Melihat antusiasme tersebut, paradigma kebijakan Inggris berubah. Inggris memutuskan untuk menutup *Al Baraka bank* di tahun 1993. Setelah itu, secara independen Inggris mulai mengupayakan pembukaan bank Islam independen yaitu *Islamic Bank of Britain* (IBB).

Kesimpulan

Fokus utama Colin Hay dalam teori konstruktivis institusionalisme adalah menganalisis transformasi kelembagaan pasca pembentukan. Ketidakseimbangan institusi (institutional disequilibrium) disebabkan perbedaan motivasi aktor dalam institusi. Hal ini disebabkan kepentingan aktor yang mengubah pemahaman terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas. Aktor tidak memiliki preferensi tetap. Setiap aktor memiliki motivasi berbeda. Konsep *Institutional Disequilibrium* dalam teori Konstruktivis Institusionalisme digunakan untuk menemukan faktor yang melatarbelakangi kerjasama Inggris dan Bahrain. Kerjasama panjang Inggris dengan negara-negara teluk telah ada bahkan sejak Perang Dunia I dimulai. Pengaruh Inggris di negara-negara teluk tidak terlepas dengan Bahrain. Pasca Berakhirnya Perang, kedekatan Inggris semakin terlihat dengan Bahrain. *Institutional disequilibrium* menjelaskan bagaimana kedekatan suatu negara dapat berubah dikarenakan perbedaan kepentingan. *Al Baraka group* merupakan lembaga keuangan terkemuka dari Bahrain. Pada tahun 1980, Inggris bekerjasama dengan *Al Baraka* lembaga keuangan Bahrain membentuk *Al Baraka bank* di London, namun ditutup pada tahun 1993. Ketidakseimbangan dalam kerjasama kedua negara tersebut dipandang karena perbedaan kepentingan.

Konstruktivis institusionalis menganalisis ketidakseimbangan dalam kerjasama internasional. Kerjasama antara Inggris dengan Al Baraka memiliki ketidakseimbangan. Inggris memiliki preferensi berbeda dengan *Al Baraka*. Perbedaan tersebut menurut konstruktivis institusionalis disebabkan oleh empat faktor; ideasional institusi, ketidakseimbangan institusi, interpretasi atas momentum penting, dan paradigma kebijakan. Melalui konstruktivis institusionalis, dapat dianalisis tindakan Inggris bekerjasama dengan *Al Baraka* adalah mempelajari keuangan Islam secara langsung dari lembaga keuangan Islam terkemuka. Ketidakseimbangan institusi terjadi saat Al Baraka bank ditutup pada tahun 1993. Di samping campur tangan *Bank of England*, Inggris memiliki preferensi berbeda dengan *Al Baraka*. Terdapat tuntutan internal masyarakat Muslim tentang bank Islam. Inggris memilih membuka bank Islam sendiri secara independen dikelola pemerintah Inggris.

Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem dan norma. Inggris memiliki kepercayaan keuangan Islam dapat berkembang di Inggris. Inggris merupakan negara dengan sistem perbankan maju. London merupakan rumah bagi para nasabah dan investor dalam perbankan konvensional. Dengan sistem yang telah mapan sebelumnya, Inggris mempersiapkan pondasi bagi keuangan Islam berkembang. Inggris bekerjasama dengan Al Baraka salah satu lembaga keuangan besar untuk membuka Al Baraka bank di tahun 1983.

Pasca ditutupnya *Al Baraka bank*, Inggris melakukan pergerakan dan membuat kebijakan memperkokoh pemahaman keuangan Islam sebelum membuka bank Islam. Yayasan Islam Inggris berperan aktif sebagai pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Yayasan ini merupakan perintis ekonomi Islam di Inggris. Universitas-universitas Inggris menyelenggarakan pengajaran keuangan Islam. Banyaknya peneliti Inggris tentang keuangan Islam membuka kemungkinan operasional bank Islam di Inggris memfasilitasi masyarakat Islam Inggris bertransaksi sesuai dengan hukum *syariah*. Masyarakat Muslim di Inggris juga memiliki bagian penting dalam perkembangan keuangan Islam di Inggris. *Lobby* dilakukan kepada pemerintah untuk mengizinkan pembukaan bank Islam di Inggris. Kelompok Muslim Inggris merumuskan bank Islam bersama *HM Treasury*, *Financial Service Authority*, dan *Bank of England*. Meskipun sudah terbentuk IBB, *Al Baraka* tetap ada di Inggris seperti halnya dengan bank Islam lain di Inggris. Namun, *Al Baraka* tidak diwajibkan untuk membuka tabungan, pembiayaan infrastruktur, dan kegiatan perbankan lainnya. Sehingga hubungan Inggris – Bahrain masih berlangsung dengan baik.

Batasan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan Inggris membentuk IBB di tahun 2004 dengan menggunakan pendekatan ilmu Hubungan Internasional dalam kerangka analisis konstruktivis institusionalisme. Data yang dikumpulkan banyak dan beragam sehingga terbuka ruang untuk pengayaan pengkajian Eropa. Terdapat pendekatan dan teori lain yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan keuangan Islam di Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin ilmu. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lintas disiplin ilmu, memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam meneliti keuangan Islam di Eropa. Penelitian ini hanya sampai kepada tingkat negara. Terdapat ruang untuk melanjutkan penelitian dengan menganalisis pada tingkat kelompok atau individu.

Referensi

- Alharbi, A. (2016). Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finances Studies*, 2(3).
- Al-Omar, F. A. (1996). *Islamic Banking: Theory, Practices and Challenges*. London: Zed Books.
- Ashar, J. (2016). Alasan United Kingdom Mengijinkan Operasional Islamic Banking Era Kepemimpinan Tony Blair. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Aslam, M. (2015). The development of Islamic finance in the UK. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 21(1), 1-28.
- Asmat, S. (2014). Islamic Finance in the Western World: Development, Legal Regulation and Challenges Faced by Islamic Finance in the United Kingdom. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Belabes, A. B. (2011). Islamic Finance and the Regulatory Challenge: The European Case. In J. Langton, *Islamic Economics and Finance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Caristi et al. (2013). *Islamic Finance in Europe*. European Central Bank. Retrieved from <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp146.pdf?50223aa58804d7b4f32f4f302534672d>
- Chachi, A. B. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development. *Islamic Economic Studies*, 22(1).
- Chase, A. (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France*. Department of Political Science, University of Michigan.
- Colditz, K. (2009). Islamic Banking - A Worthwhile Challenge for German Banks? *Master Thesis*.
- Dieppe, T. (2017). The Challenge of Islam in the UK. *Affinity Social Issues Bulletin*.
- El-Mogaddedi, Z. (2007). *Islamic Finance - Wachstumsmarkt Sukuk*. die bank.
- Ergun Ugur & Djedovic Irfan. (2011). *Islamic Banking with a Closer Look at Bosnia and Herzegovina: Knowledge, Perceptions and Decisive Factors for Choosing Islamic Banking*. Dubai: 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Ernst and Young S.A. (2019). *Luxembourg: The Gateway for the Middle East and Islamic Finance*. ey.com/luxembourg.
- Hargrave Investment. (2019). History of Hargraves Secured Investments Limited. Retrieved from <https://www.hargravesinvest.com.au/about.htm>
- Hay, C. (2006). Constructivist Institutionalism. In S. A. Rdhoeds, *The Oxford Handbook of Political Institutions*. New York: Oxford University Press.
- Housby, E.S. (2011). *Islamic Financial Services in the United Kingdom*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Institute of Islamic Banking and Insurance. (2019). About us. Retrieved from <https://www.islamic-banking.com/about-us>
- Khan, M. A., & Iqbal, Z. (2013). *Islamic banking and finance in the UK: Evolution and challenges*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Langton, J. (2011). *Islamic Economic and Finance*. England: Palgrave Macmillan.
- Maroun, Y. S. (2002). Liquidity Management and Trade Financing. In S. A. Karim, *Islamic Finance: Innovation and Growth*. London: Euromoney Books.
- Mrđa, O. (2014). *Post 9/11 Islamophobia in Western Europe*. Plzeň: University of West Bohemia.
- Muslim Council of Britain's Research and Documentation Committee. (2015). *British Muslim in Numbers*. London: The Muslim Council of Britain.
- Pew Research Center. (2023). *The Future of the Global Muslim Population*. Washington, DC: Pew Research Center.
- Riaz, U.A. (2014). *Perceptions and Experiences of British-Based Muslims on Islamic Banking and Finance in the UK* (Thesis for Doctoral Degree ed.). Dundee: University of Dundee.

- Saeed, A. (2007). Media, Racism and Islamophobia: the Representation of Islam and Muslims in the Media. *Sociology Compass*, 1.
- Schoenenbach. (2013). Chance for Islamic Finance in Germany. *True Banking*, No. 19.
- Selbourne, D. (2001). This War is not About Terror. Retrieved from <http://www.telegraph.co.uk/comment/4266165/This-war-is-not-about-terror-its-about-Islam.html>
- Speech given by Sir Edward George, Governor of the Bank of England. (2003). Retrieved from <http://www.bankofengland.co.uk>
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Wilson, R. (2010). Islamic Banking in the United Kingdom. In M. Porzio, *Islamic Banking and Finance in the European Union*. London: Edward Elgar Publishing Limited.